

HASIL PENELITIAN

PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN MADIDIR TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BITUNG

Stefanus T. Tanod¹, M.M. Rengkung², & Linda Tondobala³¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi^{2,3}Staf Pengajar Program Studi S1 Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

Abstrak. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Partisipasi Masyarakat dianggap sebagai suatu cara efektif dalam menangani permasalahan sampah karena masyarakat yang merupakan sumber sampah itu sendiri. Kota Bitung yang memiliki penduduk ±214.913 jiwa (Agustus 2012) menghasilkan sampah dengan total ±520 m³/hari, dengan hanya ±376 m³/hari yang dapat terangkut oleh Dinas Kebersihan dan ada ±144 m³/hari yang tidak terangkut. Selisih yang cukup besar membuat penelitian dirasakan perlu dilakukan mengenai tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Kecamatan Madidir dipilih karena berada di pusat Kota Bitung, dan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kecamatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan 8 (delapan) tangga partisipasi Arnstein; dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode skoring dan analisis distribusi frekuensi. Kesimpulan yang diperoleh adalah, tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Madidir terhadap program pengelolaan sampah Kota Bitung berdasarkan tipologi Arnstein berada pada tingkat ketiga yaitu pemberitahuan yang masuk dalam kategori derajat tokenisme/penghargaan. Dari hasil analisis, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, dan sosial-budaya.

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Masyarakat, Program Pengelolaan Sampah, Kecamatan Madidir, Kota Bitung

PENDAHULUAN

Pembangunan dengan pola *top-down* sudah tidak cocok dalam menangani permasalahan di daerah-daerah. Dalam perkembangannya pola yang lebih banyak dipakai adalah pola *bottom-up* dengan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombaknya. Menurut Fahrudin (2012:26), Pola ini dipakai karena usaha-usaha pembangunan yang bermula dari suatu landasan tentang “apa yang masyarakat butuhkan” bukan “apa yang baik untuk masyarakat tersebut”, biasanya menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik.

Hal inilah yang kiranya perlu

diterapkan dalam penanganan masalah sampah di perkotaan saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Menurut data yang ada, besarnya penduduk dan keragaman aktivitas di kota-kota metropolitan di Indonesia seperti Jakarta, mengakibatkan munculnya persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan seperti masalah sampah. Menurut Damanhuri & Padmi (2010:9), diperkirakan hanya sekitar 60% sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.

Kota Bitung yang penduduknya terus bertumbuh hingga mencapai ±214.913 jiwa (Laporan Kependudukan Bulan Agustus 2012. Kecamatan Madidir), tentunya menghasilkan produksi sampah yang tinggi akibat dari aktivitas kesehariannya. Jika rata-rata tiap jiwa menghasilkan sampah sebanyak 0,002 m³/hari, maka jumlah sampah di Kota Bitung adalah 429,83 m³ atau 430 m³/hari serta sampah dari industri/perusahaan sebesar 90 m³/hari sehingga total produksi sampah Kota Bitung adalah ±520 m³/hari. Dalam realita operasional volume sampah yang terangkut ke TPA dengan kendaraan operasional hanyalah ±376 m³/hari, dengan kata lain ada ±144 m³/hari yang tidak terangkut oleh kendaraan sampah. (LAKIP Dinas Kebersihan Kota Bitung 2011).

Fakta diatas menegaskan bahwa peran dari Dinas Kebersihan dalam proses pengangkutan sampah ini sangat besar sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan, mengingat sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga tanggung jawab semua pihak. Sehingga baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta harus saling bekerjasama dalam pengelolaan sampah di Kota Bitung.

Menurut Wintoko (2012:19), Cara penyelesaian yang ideal dalam penanganan sampah di perkotaan adalah dengan meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah yang dimulai pada skala kawasan (tingkat kecamatan), kemudian dilanjutkan ke skala yang lebih luas lagi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bitung No. 2 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 ayat 1 yang berbunyi *Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan ikutan pengelolaan sampah melalui kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemanfaatan atau penggunaan kembali, daur ulang dan pengomposan sampah secara maksimal*, dan pasal duanya yang berbunyi *Untuk maksud sebagaimana ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain mengembangkan teknologi tepat guna atau teknologi modern sesuai dengan kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial budaya.*

Dari penjelasan pasal di atas, Pemerintah Kota Bitung mewujudkannya

melalui kegiatan pengelolaan sampah yang juga bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Aertembaga, yaitu (1) Pemilahan Sampah; (2) Pengomposan; (3) Daur Ulang Sampah; (4) Kerja Bakti dan (5) Retribusi Kebersihan.

Seperti yang pernah termuat di Koran Tribun Manado pada hari Rabu, 7 November 2012, dimana terdapat sampah yang berserakan di beberapa titik sepanjang jalan Nusa Indah di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir. Tak jarang sampah-sampah tersebut sudah tidak pada tempatnya, ada yang sudah berada ditepi jalan dan berserakan dimana-mana.

Melihat kejadian di lapangan seperti itu, membuat peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pengelolaan sampah Kota Bitung khususnya di Kecamatan Madidir.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Madidir dalam program pengelolaan sampah Kota Bitung dan (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kecamatan Madidir dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah Kota Bitung.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Perkotaan

Menurut Nurmandi (2014:129), Manajemen Perkotaan adalah pendekatan yang kontemporer untuk menganalisis permasalahan perkotaan sekarang ini dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Pemerintah kota harus berusaha untuk mendistribusikan tanah, air, ruang, dan lingkungan yang bersih secara adil kepada semua warga masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, tanpa memandang status sosial ekonomi mereka. Sedangkan peran pihak swasta perlu diatur sedemikian rupa untuk memperoleh hasil yang optimal dalam provisi pelayanan publik kota.

Manajemen Persampahan

Manajemen persampahan meliputi produksi, pengumpulan, transfer, transport, pengolahan, dan pemusnahan atau daur ulang menurut Nurmandi (2014:129). Di kota-kota

Indonesia pada umumnya produksi sampah berasal dari tiga sumber yaitu rumah tangga, pasar, dan perkantoran atau industri. Dari berbagai studi tentang unsur sampah di kota-kota Indonesia ditemukan bahwa sebagian besar (70%) berasal dari makanan atau sampah organik yang mudah busuk.

Sampah

Dalam UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Secara umum terbagi atas sampah organik/basah, sampah anorganik/kering, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pengelolaan Sampah

Menurut UU No.18 tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut. Dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah, pemerintah menjadikan konsep 3R sebagai dasar penanganan sampah menurut UU-18/2008. 3R adalah *Reduce* (pembatasan) *Reuse* (guna-ulang) & *Recycle* (daur-ulang).

Partisipasi

Menurut Moeliono dalam Fahrudin (2012:26), dalam bahasa sehari-hari, partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Partisipasi diperlukan agar suatu kegiatan bisa dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya tidak mungkin yang bekerja hanya sendiri. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam seluruh proses kegiatan yang bersangkutan”.

Masyarakat

Dalam KBBI disebutkan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan menurut wikipedia disebutkan bahwa masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Fahrudin (2012:36), Secara terminologi, partisipasi masyarakat adalah suatu bentuk interaksi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (nonelit) dan kelompok yang selama ini mengambil keputusan (elit). Dengan demikian, pemerintah sebagai elit harus bisa menggerakkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program yang mereka rencanakan, begitu juga sebaliknya masyarakat harus berpartisipasi dengan sukarela terhadap program yang telah ditetapkan.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Arnstein (1969:216), menyebutkan bahwa terdapat 8 tangga tingkat partisipasi dalam masyarakat yaitu: (1) manipulatif, (2) terapi, (3) pemberitahuan, (4) konsultatif, (5) penenangan, (6) kemitraan, (7) pendelegasian kekuasaan, (8) kontrol masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

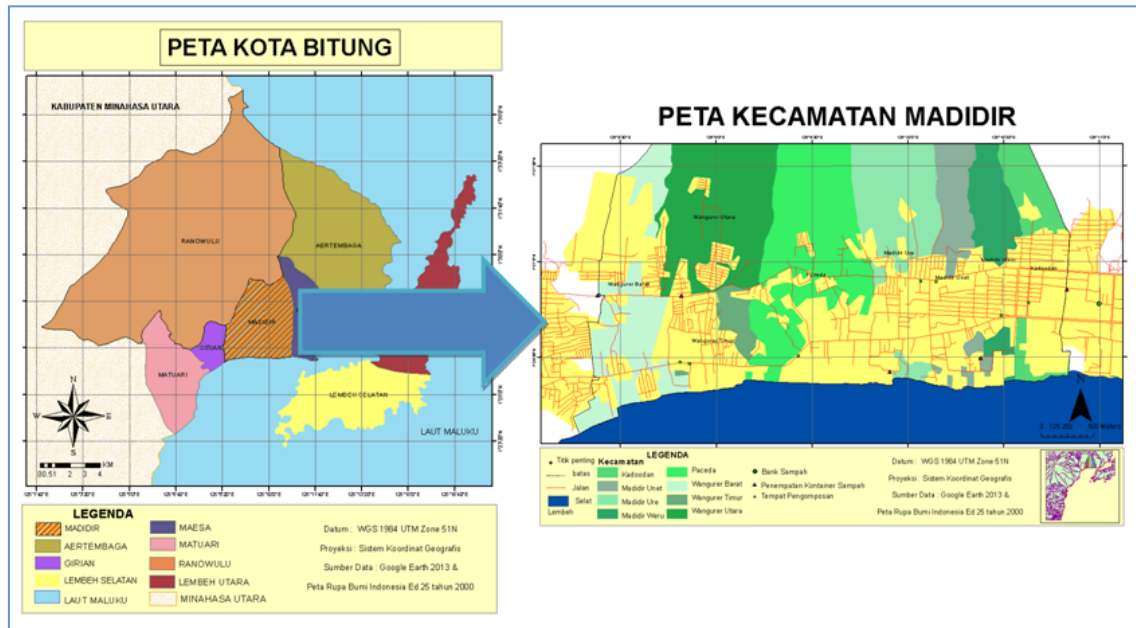
Menurut Slamet (1993:137), Partisipasi masyarakat memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, diantaranya jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, serta aspek sosial-budaya.

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Madidir karena terletak di pusat kota dan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kecamatan lainnya sehingga dianggap dapat mewakili semua kecamatan yang ada di Kota Bitung. Penelitian dilakukan dengan

menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif.

Dengan demikian dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah:



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari kuesioner yang disebar, foto lokasi, serta data partisipasi masyarakat Kecamatan Madidir terhadap program pengelolaan sampah Kota Bitung.

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, seperti Kantor Kecamatan Madidir, Dinas Kebersihan Kota Bitung, dan Dinas Tata Kota Kota Bitung.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat maka akan menggunakan metode skoring melalui penjumlahan skor dari indikator (1) pemilahan sampah, (2) pengomposan sampah (3) daur ulang sampah (4) kerja bakti (5) retribusi kebersihan. Masing-masing indikator dikaitkan dengan jenjang partisipasi masyarakat yang digunakan oleh Arnstein, yaitu 8 (delapan) tangga tingkatan partisipasi.

Delapan tangga tersebut diberi skor masing-masing berkisar antara 1-8, sehingga skor minimum bagi setiap individu adalah $5 \times 1 = 5$. Adapun skor maksimum bagi setiap individu adalah $5 \times 8 = 40$. Bila jumlah populasi adalah 100, maka skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat adalah $100 \times 5 = 500$ dan skor maksimumnya adalah $100 \times 40 = 4000$. Setelah skor minimum dan skor maksimum diketahui, maka jarak intervalnya adalah $(4000-500) / 8 = 437,5$

- *Kontrol Masyarakat* bila jumlah skornya adalah 3563,5 - 4000
- *Pendelegasian Kekuasaan* bila jumlah skornya adalah 3126 – 3562,5
- *Kerjasama* bila jumlah skornya adalah 2688,5 - 3125
- *Penenangan* bila jumlah skornya adalah 2251 – 2687,5
- *Konsultasi* bila jumlah skornya adalah 1813,5 -2250
- *Pemberitahuan* bila jumlah skornya adalah 1376 – 1812,5
- *Terapi* bila jumlah skornya adalah 938,5 - 1375
- *Manipulatif* bila jumlah skornya adalah 501 – 937,5

Setelah nilai skoring didapat, selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif untuk menjelaskan arti dari nilai skoring yang didapat. Analisis deskriptif dilakukan tiap kelurahan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat dalam mengelola sampahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Wangurer Barat

Pelaksanaan program dari pihak kelurahan setempat sudah cukup baik, karena dari hasil wawancara disertai dengan

observasi di lapangan mendapati bahwa pemerintah setempat sudah berusaha melaksanakan semua program yang ada, misalnya dengan menyediakan tempat sampah di jalan-jalan umum, serta tempat sampah 3 macam di beberapa titik padat penduduk. Namun, dari masyarakat sendiri pemilahan sampah tidak pernah dilakukan karena dari hasil pengamatan di lapangan, sampah yang dibuang semuanya tercampur menjadi satu. Selain itu, dari segi pengomposan dan daur ulang sampah pemerintah setempat sudah membangun tempatnya yang berlokasi di halaman kantor kelurahan. Program kompos dan daur ulang sampah melibatkan pala serta RT & RW dalam pengelolaannya. Namun memang ada kesulitan melibatkan masyarakat setempat secara langsung karena seringkali beralasan disibukkan dengan pekerjaan, sehingga jarang berpartisipasi. Untuk program kerja bakti tiap hari jumat pagi, sebagian besar masyarakat sudah bekerja secara mandiri membersihkan lingkungan masing-masing tanpa perlu ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak pemerintah. Sedangkan untuk program retribusi kebersihan, warga berpartisipasi lewat karcis retribusi kebersihan yang berada di loket PDAM. Dalam skoring yang dilakukan, kelurahan ini mendapatkan poin 215, yang di tangga tingkat partisipasi Arnstein ada di tahap kedua atau terapi.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Wangurer Timur

Dari observasi di lapangan serta wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan setempat, didapati bahwa untuk penyediaan drum sampah dan bak sampah 3 macam, sudah dilakukan dan ditempatkan di sepanjang jalan serta di dekat pemukiman padat penduduk. Namun dari masyarakat sendiri masih belum memilah sampahnya ketika dibuang sehingga semuanya tercampur satu sama lain. Untuk program pengomposan, dari pihak kelurahan sudah menyediakan tempatnya di halaman kelurahan setempat yang dikelola bersama-sama dengan pala serta RT & RW. Sayangnya dari masyarakat sendiri kurang aktif untuk ikut berpartisipasi dikarenakan kesibukan pekerjaan masing-masing. Untuk program bank sampah tidak dijalankan di kelurahan ini karena dianggap

bukan prioritas. Untuk program kerja bakti tiap jumat pagi, warga banyak yang aktif terlibat langsung membersihkan halaman di sekitar rumah mereka. Untuk retribusi kebersihan tidak ditarik di kelurahan ini, tetapi sebagian warga membayarnya lewat karcis retribusi kebersihan di loket PDAM. Dalam skoring yang dilakukan, kelurahan ini mendapatkan poin 181, yang di tangga tingkat partisipasi Arnstein ada di tahap pertama atau manipulatif.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Wangurer Utara

Hasil observasi serta wawancara yang dilakukan adalah, dari pihak pemerintah setempat sudah menyediakan drum sampah, serta tempat sampah 3 macam di beberapa titik. Dalam hal memilah sampah, warga disini sudah melakukannya dengan cukup baik karena tempat sampah yang berbentuk seperti rumah pombo yang dikhususkan memang sebagai tempat untuk menaruh sampah kertas, kaleng, maupun plastik selalu terisi. Namun, karena hanya ada di beberapa titik, jadi sebagian warga masih membuang sampahnya tanpa dipilah terlebih dahulu. Untuk program pengomposan dan daur ulang sampah, pemerintah menyediakan tempat pengomposan dan bank sampah yang terletak di pinggir jalan. Keduanya dikelola bersama oleh kelurahan setempat beserta pala, RT, dan RW. Dari masyarakat sendiri kurang berpartisipasi dalam kedua program ini karena disibukkan oleh kegiatan masing-masing. Hanya bank sampah saja yang jalan meskipun dengan format yang sedikit berbeda dari biasanya. Jadi sampah daur ulang seperti gelas plastik dan kardus dikumpulkan sekaligus ke dalam bank sampah. Kalau sudah penuh baru akan dijual. Untuk program kerja bakti tiap jumat pagi, warga setempat sudah terbiasa turun langsung dan membersihkan lingkungan mereka masing-masing tanpa diingatkan selalu oleh pemerintah setempat. Mengenai retribusi kebersihan banyak warga yang tidak mengetahuinya, tapi ada juga sebagian warga yang membayarnya lewat karcis retribusi kebersihan yang tersedia di PDAM. Dalam skoring yang dilakukan, kelurahan ini mendapatkan poin 154, yang di tangga tingkat partisipasi Arnstein ada di tahap pertama atau manipulatif.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Paceda

Dari hasil penelitian lewat wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, untuk penyediaan drum sampah dan bak sampah 3 macam, sudah dilakukan dan ditempatkan di sepanjang jalan serta di dekat pemukiman padat penduduk. Namun dari masyarakat sendiri masih belum memilah sampahnya ketika dibuang sehingga semuanya tercampur satu sama lain. Untuk program pengomposan, dari pihak kelurahan sudah menyediakan tempatnya di dekat *resting area* yang dikelola bersama-sama dengan pala serta RT & RW. Sayangnya dari masyarakat sendiri kurang aktif untuk ikut berpartisipasi dikarenakan kesibukan pekerjaan masing-masing. Untuk program bank sampah tidak dijalankan di kelurahan ini karena kurangnya fasilitas yang dapat mendukung jalannya program tersebut. Untuk program kerja bakti tiap jumat pagi, warga banyak yang aktif terlibat langsung membersihkan halaman di sekitar rumah mereka. Untuk retribusi kebersihan tidak ditarik di kelurahan ini, tetapi sebagian warga membayarnya lewat karcis retribusi kebersihan di loket PDAM. Dalam skoring yang dilakukan, kelurahan ini mendapatkan poin 228, yang di tangga tingkat partisipasi Arnstein ada di tahap kedua atau terapi.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Madidir Unet

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan adalah, dari pihak pemerintah setempat sudah menyediakan drum sampah, serta tempat sampah 3 macam di beberapa titik. Namun masyarakat masih membuangnya tanpa dipilah terlebih dahulu. Untuk tempat pengomposan ada di dalam sekolah yang berfungsi agar sedari dini anak-anak sudah dilatih agar mampu membuat pupuk kompos sendiri. Untuk program bank sampah tidak dijalankan di kelurahan ini, karena dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lurah, menyebutkan bahwa kelurahan ini lebih terfokus untuk membersihkan jalur drainase dan jalan utama karena merupakan salah satu lokus Kota Bitung dalam penilaian penghargaan Adipura. Untuk program kerja bakti tiap jumat pagi, warga setempat sudah terbiasa

turun langsung dan membersihkan lingkungan mereka masing-masing tanpa diingatkan selalu oleh pemerintah setempat. Mengenai retribusi kebersihan banyak warga yang tidak mengetahuinya, tapi ada juga sebagian warga yang membayarnya lewat karcis retribusi kebersihan yang tersedia di PDAM. Dalam skoring yang dilakukan, kelurahan ini mendapatkan poin 246, yang di tangga tingkat partisipasi Arnstein ada di tahap kedua atau terapi.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Madidir Ure

Segi pelaksanaan program dari pihak kelurahan setempat sudah cukup baik, karena dari hasil wawancara disertai dengan observasi di lapangan mendapati bahwa pemerintah setempat sudah berusaha melaksanakan semua program yang ada, misalnya dengan menyediakan tempat sampah di jalan-jalan umum, serta tempat sampah 3 macam di beberapa titik padat penduduk. Namun, dari masyarakat sendiri pemilahan sampah tidak pernah dilakukan karena dari hasil pengamatan di lapangan, sampah yang dibuang semuanya tercampur menjadi satu. Padahal dari pihak kelurahan sendiri sudah melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut. Selain itu, dari segi pengomposan pemerintah setempat sudah membangun tempatnya yang berlokasi di samping Balai Latihan Kerja. Program kompos melibatkan pala serta RT & RW dalam pengelolaannya. Namun memang ada kesulitan melibatkan masyarakat setempat secara langsung karena seringkali beralasan disibukkan dengan pekerjaan, sehingga jarang berpartisipasi. Untuk program daur ulang sampah, ada sebuah keluarga yang membuka kios daur ulang sampah dimana dari sisa-sisa bahan yang terpakai, diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi maupun fungsional. Untuk program kerja bakti, di kelurahan ini dilaksanakan 2 kali yaitu tiap hari jumat pagi, dan pada hari selasa. Hal ini dilakukan karena jika hanya sekali tiap seminggu dilakukan kerja bakti, itu tidak akan mampu menanggulangi sampah yang ada. Sebagian besar masyarakat sudah bekerja secara mandiri membersihkan lingkungan masing-masing tanpa perlu ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak pemerintah. Sedangkan untuk program

retribusi kebersihan, warga berpartisipasi lewat karcis retribusi kebersihan yang berada di loket PDAM. Dalam skoring yang dilakukan, kelurahan ini mendapatkan poin 187, yang di tangga tingkat partisipasi Arnstein ada di tahap pertama atau manipulatif.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Madidir Weru

Hasil observasi serta wawancara yang dilakukan adalah, dari pihak pemerintah setempat sudah menyediakan drum sampah, serta tempat sampah 3 macam di beberapa titik. Namun, dari masyarakat sendiri pemilahan sampah tidak pernah dilakukan karena dari hasil pengamatan di lapangan, sampah yang dibuang semuanya tercampur menjadi satu. Padahal dari pihak kelurahan sendiri sudah melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut. Selain itu, dari segi pengomposan pemerintah setempat sudah membangun tempatnya yang berlokasi di dalam taman dotulong yang dikelola oleh piak kelurahan, pala, RT, dan RW. Untuk program bank sampah dulu sempat dijalankan, namu sekarang sudah tidak lagi karena lebih berfokus ke pengomposan. Untuk program kerja bakti, di kelurahan ini dilaksanakan 2 kali yaitu tiap hari jumat pagi, dan pada hari senin. Hal ini dilakukan karena jika hanya sekali tiap seminggu dilakukan kerja bakti, itu tidak akan mampu menanggulangi sampah yang ada. Sebagian besar masyarakat sudah bekerja secara mandiri membersihkan lingkungan masing-masing tanpa perlu ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak pemerintah. Sedangkan untuk program retribusi kebersihan, warga berpartisipasi lewat karcis retribusi kebersihan yang berada di loket PDAM. Dalam skoring yang dilakukan, kelurahan ini mendapatkan poin 149, yang di tangga tingkat partisipasi Arnstein ada di tahap pertama atau manipulatif.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Kadoodan

Melalui wawancara dan observasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa, untuk penyediaan drum sampah dan bak sampah 3 macam, sudah dilakukan dan ditempatkan di sepanjang jalan serta di dekat pemukiman padat penduduk. Namun dari masyarakat sendiri masih belum memilah sampahnya ketika dibuang sehingga semuanya tercampur satu sama lain. Untuk program pengomposan, dari pihak kelurahan sudah menyediakan tempatnya di dekat kantor lurah. Sayangnya dari masyarakat sendiri kurang aktif untuk ikut berpartisipasi dikarenakan kesibukan pekerjaan masing-masing. Untuk program bank sampah tidak dijalankan di kelurahan ini karena kurangnya fasilitas yang dapat mendukung jalannya program tersebut, selain itu kelurahan ini dekat dengan bank sampah yang terletak di kantor Dinas Kebersihan Kota Bitung. Untuk program kerja bakti tiap jumat pagi, warga lebih bersikap pasif karena menunggu pemerintah untuk mengajak bekerja bersama-sama. Untuk retribusi kebersihan tidak ditarik di kelurahan ini, tetapi sebagian warga membayarnya lewat karcis retribusi kebersihan di loket PDAM. Dalam skoring yang dilakukan, kelurahan ini mendapatkan poin 137, yang di tangga tingkat partisipasi Arnstein ada di tahap pertama atau manipulatif.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Madidir dalam Pemilahan Sampah

Total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 235, dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat termasuk dalam tangga kedua yaitu tingkat *terapi*. Program ini hanya sampai pada tingkat kedua karena masyarakat sendiri tidak mengetahui tentang adanya pemilahan sampah ini. Sehingga sampah dari dalam rumah tidak dipilah langsung berdasarkan jenisnya melainkan langsung dibuang ke TPS terdekat. Padahal tempat sampah yang disediakan sudah dibagi berdasarkan kategorinya. Namun tidak adanya sosialisasi dari pemerintah bahwa sampah dipilah semenjak dari rumah, menyebabkan tercampurnya sampah yang dibuang ke TPA.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Madidir dalam Pengomposan Sampah

Total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 216, dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat termasuk dalam tangga kedua yaitu tingkat *terapi*. Pada program ini, masyarakat juga kurang berpartisipasi karena dalam pelaksanaannya, program pengomposan dilaksanakan oleh petugas dari kelurahan dan masih kurang melibatkan masyarakat dalam skala yang lebih besar secara bersama-sama. Tempat-tempat pengomposan yang dibuat jarang digunakan oleh masyarakat dan ada beberapa tempat pengomposan yang berubah menjadi tempat sampah, karena salah dipahami oleh masyarakat.

Tingkat Partisipasi masyarakat Kecamatan Madidir dalam Daur Ulang Sampah

Total skor yang diperoleh dari analisis ini adalah 176, dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat termasuk dalam tangga pertama, yaitu tingkat *manipulatif*. Pada program ini, sebagian besar responden yang ditanya mengaku tidak mengetahui tentang adanya program ini, karena selain dari sosialisasi dari pemerintah yang masih kurang, bank sampah yang tersedia masih belum cukup untuk melayani masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Madidir dalam Kerja Bakti

Total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 689, dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat mencapai tangga ketujuh, atau berada pada tingkat *Pendelegasian*. Program ini menjadi yang paling tinggi tingkat partisipasinya karena sudah lebih dulu dilaksanakan dari program yang lain dan secara konsisten dilakukan setiap jumat pagi oleh aparat pemerintah dan masyarakat setempat. Sehingga lama-kelamaan program kerja bakti ini sudah menjadi kebiasaan dan rutin dilaksanakan oleh warga dengan membersihkan halaman di sekitar rumah mereka sendiri.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Madidir dalam Retribusi Kebersihan

Total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 210, dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat mencapai tangga kedua, atau berada pada tingkat *terapi*. Retribusi kebersihan mulai kembali lagi diaktifkan semenjak awal Bulan Januari 2013 oleh Dinas Kebersihan Kota Bitung. Pengelolaan keuangannya nanti akan kembali lagi ke dinas ini. Penarikan retribusi ini mulai kembali diadakan setelah pemerintah merasa bahwa seluruh daerah di Kota Bitung sudah dilayani oleh fasilitas pengangkutan sampah. Besarnya penarikan tiap bulannya akan berbeda tergantung dari kondisi bangunan milik warga. Untuk awalnya Dinas Kebersihan Kota Bitung melakukan kerjasama dengan PDAM cabang Bitung, dimana dalam setiap slip pembayaran akan disertai dengan lembaran retribusi kebersihan. Namun sayangnya cara ini masih kurang efektif karena besaran tagihan yang tertera pada lembaran retribusi semuanya seragam yaitu Rp.5.000,- sehingga tidak terdapat perbedaan besaran tarif yang harus dibayarkan, dan juga dengan menjamurnya loket pembayaran online, membuat warga sudah tak pergi ke kantor PDAM untuk membayar tagihan airnya.

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Madidir Terhadap Program Pengelolaan Sampah di Kota Bitung Secara Keseluruhan

Dari hasil penjumlahan kelima hasil skoring terhadap program pengelolaan sampah diatas, maka didapat hasil 1526, dengan demikian secara keseluruhan tingkat partisipasi Kecamatan Madidir masuk dalam tingkat ketiga atau pemberitahuan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Faktor Jenis Kelamin

Berdasarkan observasi serta wawancara yang dilakukan, perempuan jauh lebih banyak berurusan dengan pengelolaan sampah daripada dengan laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan juga karena sebagai ibu rumah tangga, perempuan sering berada di dapur yang merupakan salah satu tempat penghasil sampah di rumah. Selain itu melalui

kegiatan seperti PKK, membuat perempuan lebih dekat dengan pengomposan maupun membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan daur ulang.

Faktor Usia

Sebagian besar responden (52 persen) berada pada tahap dewasa awal, dimana itu merupakan usia produktif mereka. Jumlahnya hampir sama dengan responden yang berada pada tahap dewasa madya sebesar 42 persen, dengan 6 persen sisanya berada pada usia lanjut. Perbedaan usia menyebabkan perbedaan jenis partisipasi yang diberikan, seperti golongan tua yang akan lebih banyak berpendapat daripada golongan muda yang lebih aktif bekerja di lapangan.

Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, diharapkan mempunyai pengetahuan yang lebih juga mengenai pembangunan serta bentuk partisipasi yang dapat diberikan, bisa berkomunikasi lebih mudah dengan orang luar, serta tanggap terhadap inovasi. Dengan jumlah tingkat pendidikan responden mayoritas merupakan tamatan SMA sebesar 60 persen, tamatan SMP sebanyak 5 persen, serta tamatan SD sebanyak 7 persen, dan sarjana sebanyak 28 responden.

Pekerjaan

Karena pekerjaan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang, maka dapat dikatakan bahwa suatu mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jenis pekerjaan terbesar responden berasal dari sektor swasta sebanyak 50 persen yang berarti waktu untuk berpartisipasi lebih sedikit, namun dapat memberikan sumbangan berupa uang lebih banyak. Ibu rumah tangga sebanyak 22 persen berarti kurang bisa memberikan sumbangan berupa uang namun dapat memberikan sumbangan berupa tenaga di waktu luang. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 responden berarti partisipasi mereka terhadap pemerintah sejalan dengan program pemerintah yang nantinya akan dilaksanakan, serta dll sebanyak 10 responden.

Tingkat Penghasilan

tingkat penghasilan terbanyak adalah responden dengan penghasilan perbulan sebesar 1-2,5 juta rupiah sebesar 66%, diikuti oleh responden yang belum berpenghasilan sebesar 15%, responden yang berpenghasilan dibawah satu juta rupiah, dan responden dengan penghasilan sebesar 2,5 juta rupiah sampai 5 juta rupiah sebesar 9 responden. Dari perolehan diatas, responden yang berpenghasilan besar cenderung akan berpartisipasi dalam bentuk sumbangan uang. Sementara penduduk yang cenderung pas-pasan akan berpartisipasi dalam hal tenaga.

Asal Daerah

Dari hasil penelitian didapat bahwa 81 persen responden merupakan warga asli bitung, 16 persen merupakan penduduk sangihe talaud, 2 persen penduduk asal jawa, dan 1 persen berasal dari kotamobagu. Responden yang merupakan warga asli bitung cenderung akan lebih menjaga kebersihan lingkungannya, daripada warga yang merupakan pendatang di Kota Bitung. Hal ini dikarenakan rasa memiliki yang besar akan tanah kelahiran akan memunculkan rasa peduli yang besar akan kemajuan daerahnya sendiri. Dalam hal ini, program pengelolaan sampah yang dijalankan di Kota Bitung.

KESIMPULAN

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Madidir terhadap Program Pengelolaan Sampah Kota Bitung mendapat nilai skor 1526 sehingga menurut tangga partisipasi Arnstein masuk dalam kategori "Pemberitahuan", yang berada pada tangga partisipasi ketiga, dan termasuk kedalam derajad tokenisme/penghargaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi program pengelolaan sampah di Kota Bitung, diantaranya adalah jenis kelamin dimana responden wanita mencapai 50% dan berpengaruh terhadap pengelolaan sampah. Kemudian usia, dimana responden pada tahap usia dewasa awal yang merupakan usia produktif mencapai 52%, dan asal daerah, dimana 81 persen responden merupakan warga asli bitung yang mempengaruhi tingkat partisipasi

masyarakat Kecamatan Madidir terhadap program pengelolaan sampah Kota Bitung

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2013. Profil Dinas Kebersihan Kota Bitung Tahun 2013. Pemerintah Kota Bitung
- Arnstein, Sherry R. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. JAIP, Vol. 35, Juli, No. 4: 216-224. American Planning Association. San Fransisco
- Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri. 2010. Pengelolaan Sampah. Diktat Kuliah. Bandung: Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB
- Fahrudin Adi. 2012. Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora
- Nurmandi, Achmad. 2014. Manajemen Perkotaan. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government
- Slamet Y. 1993. "Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi." Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wintoko, Bambang. 2012. Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.